

EVALUASI PENUGASAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG
TERHADAP KESIAPAN OPERASI MILITER UNTUK PERANG
PRAJURIT BRIGADE INFANTERI 2 MARINIR

EVALUATION OF MILITARY OPERATIONS ASSIGNMENT IN ADDITION
TO WAR ON MILITARY OPERATION PREPARATION FOR WAR SOLDIERS
2ND INFANTRY BRIGADE MARINES

Agus Sunardi¹

Prodi Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
asunardi20@gmail.com

Abstrak

Prajurit Korps Marinir senantiasa dituntut kesiapannya dalam menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dari ancaman yang dilaksanakan melalui OMP dan OMSP, seperti tugas-tugas perbantuan oleh prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir kepada Kementerian/Lembaga dalam menertibkan dan mengamankan lingkungan Bandara dan Kereta Api. Tesis ini didasarkan pada aspek profesional, sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengetahui dampak penugasan operasi militer selain perang, kompetensi dan disiplin prajurit serta kesiapannya dalam melaksanakan operasi. Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu melalui wawancara dilanjutkan dengan analisis data primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapatkan, bahwa penugasan OMSP membawa dampak menurunnya ketrampilan militer dan naluri tempur bagi prajurit yang melaksanakan, hal ini lebih disebabkan karena tidak adanya waktu untuk berlatih ketrampilan bertempur dan pembinaan fisik lainnya. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti, pertama rotasi penugasan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Kedua Batalyon yang dipersiapkan khusus untuk melaksanakan penugasan OMP tidak dilibatkan dalam penugasan OMSP.

Kata Kunci : Korps Marinir, Brigade Infanteri 2 Marinir, Operasi Militer Selain Perang, Operasi Militer Untuk Perang

Marine Corps personnel are responsible for upholding sovereignty, maintaining territorial integrity and protecting the whole nation from threats carried out through Military War Operation and MOOTW, such as tasks assistance by 2nd Marines Infantry Brigade soldiers to protect and guard train stations and airports. This thesis is based on the professional aspect, as a basis for evaluating and knowing the impact of the assignment of military operations in addition to war, competence and discipline of soldiers as well as their readiness in carrying out the operation. This thesis is using qualitative approach method that is through interview followed by primary and secondary data analysis. The conclusions are that OMSP's assignments have the effect of declining military skills and combat instinct for the soldiers, which is due to the lack of

¹ Penulis adalah Mahasiswa Prodi SPS Universitas Pertahanan C-8 TA 2016/2017

time to practice battle skills and other physical coaching. As for the advice given by the researcher, the first rotation of the assignment is not more than 3 (three) months. Both Battalions specially prepared for carrying out Military War Operation assignments are not involved in MOOTW assignments.

Keywords: *Marines Corps, 2nd Marine Infantry Brigades, Military Operation Other Than War, Military War Operation.*

Pendahuluan
Operasi Militer Untuk Perang (OMP) merupakan segala bentuk penggunaan dan pengerahan kekuatan militer untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap negara kesatuan republik indonesia (NKRI), bisa juga dikatakan konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang serta tunduk pada hukum perang internasional. Indonesia tahun 1960an pernah melaksanakan operasi militer yaitu saat konfrontasi melawan Malaysia yang dikenal dengan Dwikora dan bertempur dengan Belanda untuk memperebutkan kembali Irian Barat (Papua) yang terkenal dengan Trikora, tetapi setelah operasi tersebut sampai sekarang belum ada operasi militer yang dapat dikategorikan OMP,

Penugasan-penugasan yang dilakukan lebih kepada penugasan OMSP, seperti tugas perbantuan kepada Kementerian/ Lembaga selain Kementerian Pertahanan. Tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).³ Di dalam OMSP sendiri tugasnya dirinci menjadi 14 butir tugas yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan

² UU No. 34/ 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (1)

³ Ibid ayat (2)

bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); membantu

pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dalam menjalankan perannya, militer berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman; sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sementara, untuk menghadapi bentuk dan sifat ancaman nirmiliter, menempatkan kementerian dan lembaga sebagai *leading sector* dan militer sebagai pendukung.⁴

⁴ Kemhan RI Buku Putih (2015, h. 107).

Luasnya wilayah negara kesatuan republik indonesia, secara geografis memiliki nilai strategis bagi bangsa indonesia, karena terletak pada posisi silang diantara dua benua yaitu Asia dan Australia serta diantara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, tetapi disisi lain konfigurasi geografis Indonesia ini juga menjadi sangat rawan terhadap berbagai macam ancaman, antisipasi Angkatan Laut dalam mencegah dan menanggulangnya, dituntut kemampuan pengendalian laut yang dilaksanakan melalui gelar patroli kapal-kapal perangnya dan proyeksi kekuatan melalui operasi amfibi.

Operasi amfibi merupakan salah satu dari kegiatan OMP yang dilaksanakan oleh gabungan antar matra atau hanya TNI AL, yang dapat diartikan sebagai suatu serangan yang dilancarkan dari laut oleh satuan laut TNI AL dan pasukan pendarat yang dimuat dalam kapal-kapal dan sarana pendarat amfibi serta didaratkan di pantai musuh dan/atau pantai yang

berpotensi dikuasai musuh. Operasi amfibi diselenggarakan dalam rangka operasi pertahanan baik bersifat ofensif strategis maupun defensif strategis, serta berperan sebagai salah satu pemukul yang menentukan dalam rangka operasi keamanan dalam negeri.⁵ Operasi amfibi dalam pelaksanaannya mengintegrasikan berbagai jenis kekuatan yaitu kapal, pesawat udara, dan pasukan pendarat, dalam suatu serangan terhadap pantai musuh dan atau pantai yang berpotensi dikuasai musuh, serta bersifat kelautan dalam arti bahwa TNI AL memegang peranan utama sebagaimana tercermin dalam cara pelaksanaan operasi tersebut

Korps Marinir merupakan salah satu komando utama pembinaan dan operasional TNI AL, mempunyai tugas membentuk dan menyiapkan kesiapan 3 (tiga) Brigade Pendarat Amfibi (Brigrat), salah satunya adalah Brigrat 2 Marinir, dimana pembinaan dan pengoperasian unsur-unsurnya

⁵ Kep Pang TNI, tentang Doktrin Operasi Amfibi, (2013, h 3),

dibawah kendali Komandan Pasmar 2 Marinir. Brigade Pendarat Marinir merupakan kekuatan pemukul strategis yang dapat diproyeksikan setiap saat ke seluruh penjuru wilayah nusantara, dalam rangka menghancurkan invasi militer negara lain melalui operasi amfibi. Brigade Infanteri 2 Marinir merupakan bagian dari Brigade Pendarat 2 Marinir, terdiri dari 3 (tiga) Batalyon Infanteri, dengan pembagian tugas Yonif 4 Marinir sebagai Batalyon Tim Pendarat yang secara khusus dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan penugasan OMP dalam rangka menghadapi kemungkinan agresi militer dari negara lain, sementara Yonif 2 Marinir dan Yonif 4 Marinir dipersiapkan untuk menghadapi penugasan-penugasan OMSP.

Metode Penelitian
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda ilmiah.⁶ Sumber data dalam penelitian ini berasal dan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer atau utama diperoleh dan beberapa informan atau narasumber pada institusi Brigade Infantri 2 Marinir, Komando latihan Korps Marinir, Pasmar 2 Marinir, Korps Marinir dan Markas Besar Angkatan Laut. Sumber data sekunder berupa pendapat para nara sumber yang terkait dengan evaluasi penugasan operasi militer selain perang terhadap kesiapan operasi militer untuk perang yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah dan laporan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

⁶ Moleong, J. Lexy. (2016) : Metodologi Penelitian Kualitatif

kualitatif ini lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*deep interview*). Teknik ini merupakan langkah awal dari teknik pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif.⁷ Guna memperoleh informasi maupun data yang lebih mendalam tentang informan atau narasumber yang dijadikan responden, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan mewakili tingkatan yang ada dalam obyek penelitian.

Peneliti juga melakukan Observasi dan turun langsung kelapangan melakukan melakukan pengamatan terhadap pelaku serta aktifitas narasumber/ informan dalam lingkungannya. Ada beberapa alasan dalam penelitian kualitatif pengamatan (observasi) dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya.⁸ sebagai berikut :

Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi merupakan alat yang

paling ampuh untuk mengetes suatu kebenaran.

Kedua, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dan data.

Keempat, jalan terbaik untuk mengecek dan memperoleh jawaban atas keraguan pada data yang dijangahnya dari hasil wawancara.

Kelima, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks.

Keenam, ketika teknik komunikasi tidak dimungkinkan maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Data yang didapatkan kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

⁷ Creswel, W.Jhon, W. (2014) : Penelitian Kualitatif dan Desain Riset

⁸ Guba dan Lincoln (1981; 191-193) dalam Moleong (2016; 174)

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹ supaya menjawab pertanyaan tentang hasil evaluasi penugasan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dari para narasumber dan data-data sekunder didapatkan, bahwa :

1. Penugasan OMSP yang dilakukan oleh prajurit Yonif 2 Marinir dan Yonif 6 Marinir di berbagai tempat seperti misalnya pengamanan objek vital Pelabuhan, Bandar Udara dan Kereta Api serta tugas perbantuan lainnya disejumlah Kementerian/Lembaga, merupakan bentuk implementasi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dibuat oleh pimpinan TNI dan Kementerian/Lembaga.

Operasi militer selain perang merupakan operasi yang dilaksanakan bukan dalam rangka menghadapi agresi militer dari negara lain, tetapi untuk menghadapi ancaman dan gangguan keamanan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan beragam resiko dan dampaknya.

OMSP bisa dikatakan merupakan operasi preventif. Artinya dalam operasi ini kegiatan yang dilakukan seperti menyiapkan operasi intelijen dari satuan Yonif 2 Marinir dan Yonif 6 Marinir di daerah-daerah rawan konflik seperti Aceh, Poso, Kalimantan dan Papua di bawah kendali BAIS TNI guna memantau perkembangan situasi keamanan nasional dan deteksi dini terhadap aksi-aksi radikal, serta bekerja sama dengan satuan Intelijen lainnya dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. OMSP juga merupakan operasi sasaran terpilih melalui pelaksanaan tugas pengamanan VIP, VVIP dan Objek Vital, termasuk

⁹ Bogdan dan Biklen 1982 dalam Moleong (2016; 248)

juga operasi penanggulangan bencana yang tergabung dalam satuan tugas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI, dalam rangka mengantisipasi tugas-tugas penanggulangan bencana alam secara cepat di seluruh NKRI, termasuk tugas pertolongan/SAR, serta operasi internasional di bawah PBB melalui penyiapan kekuatan satuan untuk diproyeksikan dalam operasi pemelihara perdamaian

Penugasan OMSP, menyebabkan prajurit Yonif 2 Marinir dan Yonif 6 Marinir yang melaksanakan kegiatan tersebut, tidak mempunyai waktu untuk melatih lima kemampuannya secara intensif, baik perorangan maupun satuan secara utuh. Setiap prajurit marinir wajib memiliki 5 (lima) kemampuan pokok perorangan yang senantiasa dilatihkan. Latihan ini tidak hanya dilakukan oleh prajurit Infanteri tetapi juga prajurit Kavaleri, Arhanud maupun Bantuan Tempur. Kemampuan prajurit tersebut yaitu kemampuan menembak, berenang,

melakukan cross country, halang rintang dan jurit marinir, latihan ini mencerminkan bagaimana kesiapan dan kesemaptannya dalam mengemban tugas-tugas yang akan dihadapi, baik tugas di masa damai maupun pada masa perang.

Prajurit yang terlibat kegiatan OMSP tersebut juga tidak mempunyai waktu untuk melaksanakan latihan yang telah diprogramkan, seperti latihan tempur mulai dari tingkat M-1 sampai dengan tingkat M-4, hal ini mengakibatkan siap tempur penuh-1 (ST-1), dimana suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan tugas sesuai fungsi utamanya atau tugas pokok yang diembannya meliputi personil, material dan pelaksanaan latihan, tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

ST-1 dikatakan siap apabila 3 (tiga) unsur atau bidang kesiapan tempur masing-masing yang dipersyaratkan lebih besar atau sama dengan 95 %. Penugasan OMSP menjadikan prajurit Yonif 2 Marinir dan Yonif 6 Marinir hanya

mampu melaksanakan siap tempur sebagian atau siap tempur 2 (ST-2) artinya suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan semua fungsi utama/tugas pokoknya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, karena 3 (tiga) unsur/ bidang kesiapan tempur yang meliputi personil, material dan pelaksanaan latihan dipenuhi masing-masing lebih besar atau sama dengan 80 %.

Profesionalisme bagi prajurit menjadi tuntutan yang tidak terelakkan, *The one prime essential for any system of civilian control is the minimizing of military power. Objective civilian control achieves this reduction by professionalizing the military, by rendering them politically sterile and neutral.*¹⁰ Dapat diartikan secara bebas bahwa Yang paling utama dalam supremasi sipil atau sistem kontrol sipil adalah meminimalkan kekuatan militer secara obyektif dengan memprofesionalkan militer,

dengan membuat mereka bersih dan netral dari unsur politik. Prinsip profesional mensyaratkan membangun prajurit yang profesional dan organisasi militer yang efektif dan efisien. Hal ini juga mengandung arti bahwa seorang prajurit harus memiliki keahlian dan ketrampilan khusus dalam bidangnya dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya. Memahami profesionalisme militer tidak dapat dilepaskan dari hubungan sipil-militer, bahwa supremasi sipil merupakan syarat mutlak bagi profesionalisme militer.¹¹ Pendapat Huntington sangat jelas merumuskan bahwa militer hanya dapat profesional bilamana militer tidak campur tangan di bidang politik. Ia berpendapat bahwa profesionalisme militer mengandung tiga makna sebagai berikut :

Pertama Keahlian (*expertise*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa orang yang profesional

¹⁰ Samuel, P. Huntington. (1957) : *The Soldier and The State " The Theory and Politics of civil Military Relation"*

¹¹ Rusdi, M. Al Araf, Ghufon, M. junaidi. (2005) : *Menuju TNI Profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI)*

adalah orang ahli yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam bidang tertentu. Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan di lembaga yang mempunyai otoritas di bidangnya.

Kedua, Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa orang yang profesional adalah orang yang memiliki tanggung jawab sosial atas profesinya yang memiliki klien yakni anggota masyarakat sendiri, dimana bentuk kerja dan imbalannya tidak semata-mata atas kinerja yang dilakukan. Dalam konteks profesionalisme militer, tanggung jawab sosial terlihat dari peran, fungsi, dan kinerjanya yang melindungi negara dan masyarakat dari ancaman senjata.

Ketiga, Kesatuan (*corporateness*), yang dimensinya menunjuk pada kesadaran dan loyalitas bahwa mereka adalah anggota sebuah kelompok atau lembaga khusus dan terhormat yang mempunyai kompetensi profesional berdasarkan standar formal yang

ditetapkan. Dimensi ini mengandung makna bahwa mereka memiliki prinsip, struktur, lembaga, dan kode etik sendiri.

Dengan demikian dapat disintesis bahwa dampak penugasan OMSP yang dilaksanakan oleh prajurit Yonif 2 Marinir dan Yonif 6 Marinir berpengaruh terhadap profesionalisme yang bersangkutan, karena memang untuk sementara hanya dipersiapkan melaksanakan tugas OMSP. Seorang prajurit sudah seharusnya mempunyai kesempatan dan *skill* militer yang mumpuni, sebagai wujud kesiapsiagaan dalam menghadapi tugas tugas tempur dimasa datang, meskipun hal itu kemungkinan terjadinya sangat kecil, tetapi bukan berarti prajurit melalaikan latihan-latihan yang mengarah terhadap kesiapan tersebut.

2. Pembinaan latihan dalam rangka kesiapan melaksanakan OMP yang dilakukan prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir, secara intensif

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan, maupun ketrampilan personil, baik perorangan ataupun kesatuan, supaya tercapai tingkat kesiapan operasional yang dipersyaratkan, sumber daya manusia militer perlu disiapkan secara profesional dan seksama, sehingga mencapai tingkat kemampuan atau kompetensi seperti yang sudah ditetapkan.¹²

Pembinaan latihan prajurit Yonif 4 Marinir merupakan suatu sistem pembinaan yang terpadu antara kesiapan personil, kesiapan material dan perangkat lunak yang dirangkai dalam siklus kegiatan latihan dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dengan penggolongan latihannya sebagai berikut :

a. Latihan Bertingkat dan Berlanjut, merupakan latihan bagi prajurit dan satuan agar memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang standar.

Diselenggarakan secara bertingkat dan berlanjut dimulai

dari tingkat latihan perorangan dasar secara teknis sampai dengan latihan satuan antar angkatan secara taktis. Latihan bertingkat dan berlanjut dilaksanakan secara bertahap dimulai dari latihan tingkat M-1 sampai dengan M-4, maksudnya adalah :

1) Latihan Tingkat M-1.

Latihan tingkat M-1 merupakan latihan pembinaan kemampuan pengetahuan dan keterampilan perorangan bagi setiap prajurit Korps Marinir yang terprogram sepanjang tahun anggaran sampai dengan satuan kecil sesuai jenis kesenjataan atau fungsi penugasannya.

2) Latihan Tingkat M-2.

Latihan tingkat M-2 merupakan latihan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis satuan sampai dengan tingkat kompi/ baterai sesuai jenis kesenjataan

3) Latihan Tingkat M-3.

Latihan tingkat M-3 merupakan latihan dalam rangka pembinaan dan peningkatan

¹² Syaiful Anwar (2016) : Melindungi Negara

kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis satuan sampai dengan tingkat batalyon/ latihan pasukan pendarat setingkat Batalyon Tim Pendarat.

4) Latihan Tingkat M-4.

Latihan tingkat M-4 merupakan latihan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis satuan sampai dengan tingkat resimen /brigade dan latihan Pasrat setingkat brigade pendarat.

b. Latihan Tidak Bertingkat dan Berlanjut merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan yang telah dicapai atau untuk memperoleh keahlian disuatu bidang tertentu yang diperlukan dalam rangka pembinaan unsur/satuan jajaran Kormar. Latihan tersebut meliputi latihan dalam rangka peningkatan/ pematapan kemampuan jabatan dan latihan dalam rangka peningkatan/pematapan kesiapan satuan.

Latihan-latihan tersebut diatas menunjukkan bahwa prajurit Yonif 4 Brigif 2 marinir tidak pernah lupa akan jati dirinya sebagai prajurit TNI yang harus disiplin berlatih dan mengasah ketrampilan militernya, disiplin merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi.¹³ Hanya dengan cara disiplin yang tinggi prajurit menjadi profesional dan kompeten serta siap mengamankan negara dan bangsa Indonesia. Kompetensi adalah Karakteristik personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan.¹⁴ artinya sukses tidaknya pelaksanaan tugas pokok yang diemban oleh prajurit dalam suatu

¹³ Fadila, Helmi, Avin. (1996) : Disiplin Kerja, Buletin Psikologi Tahun IV No 2 Desember 1996 Edisi Khusus Ulang Tahun XXXII, hal 35

¹⁴ Mc.Clelland dalam Kompetensi Moeheriono, (2010, h 6),

kelompok, tergantung dari individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut, karena kemampuan individu mempengaruhi ketangguhan kelompok dalam melaksanakan misinya.

Dengan demikian dapat disintesis bahwa pertahanan negara republik Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi dan segenap sumber daya nasional yang ada dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara terpadu. Pada situasi perang dimana negara menghadapi ancaman nyata, pemerintah mendayagunakan sistem pertahanan yang sesuai dengan ancaman yang ada. Sistem pertahanan negara republik Indonesia harus kuat dan untuk menjadi kuat di dalam menghadapi ancaman kekuatan militer negara lain, tidak ada cara lain kecuali dengan berlatih dan berlatih, serta memadukan pertahanan militer dan nirmiliter dalam susunannya

yaitu militer sebagai komponen utama dan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen cadangan serta komponen pendukung. Kesiapan

melaksanakan penugasan OMP oleh prajurit Yonif 4 Brigade Infanteri 2 Marinir menjadi prioritas dan dilaksanakan melalui latihan-latihan secara terprogram, baik latihan bertingkat dan berlanjut maupun latihan yang tidak bertingkat dan tidak berlanjut. Hal ini merupakan salah satu bentuk antisipasi, karena setiap saat ditugaskan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, khususnya yang datang dari negara lain yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara republik Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh pada penelitian serta teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran dalam

tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penugasan Operasi Militer Selain Perang yang dilakukan oleh Prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigade Infanteri 2 Marinir, merupakan implementasi dari MoU antara pimpinan TNI dengan pimpinan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Tugas perbantuan selama ini dapat dirangkum menjadi tugas penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*humanitarian relief*), tugas kegiatan kemasyarakatan (*civic mission*), tugas pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum, serta tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Tugas pemberian bantuan kepada pemerintahan daerah dan kementerian/lembaga selama ini, dilakukan dalam bentuk tugas pengamanan, seperti pengamanan Bandara, pengamanan Kereta Api, pengamanan Pilkada, pengamanan Demonstrasi/Unjuk Rasa dan penugasan perbantuan lainnya.

Dampak penugasan OMSP yang dilaksanakan adalah Menurunnya Skill militer dan naluri tempur prajurit yang bersangkutan atau yang melaksanakan, karena penugasan OMSP yang dilakukan bersifat statis dan menyita banyak waktu, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan latihan ketrampilan 5 (lima) aspek kemampuan perorangan, dimana kemampuan tersebut harus dimiliki oleh setiap prajurit marinir, seperti latihan menembak, CC, HR, renang dan Hanmars, begitu juga kegiatan latihan tempur yang lain mulai dari tingkat M1 s/d M4, tidak bisa terlaksana secara maksimal. Hal ini mempengaruhi kesiapan tempurnya menjadi siap tempur 2 artinya suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan tugas semua fungsi utama/tugas pokoknya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Akibatnya kesiapan tempur yang meliputi personil, material dan latihan masing-masing tidak lebih besar atau sama dengan 80% dan termasuk kategori siap tempur

sebagian (ST-2). Kegiatan latihan oleh prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigade Infanteri 2 Marinir secara keseluruhan, baru dapat dilaksanakan apabila penugasan OMSP telah selesai dilakukan.

2. Yonif 4 Brigade Infanteri 2 Marinir merupakan Batalyon Tim Pendarat yang dipersiapkan untuk melaksanakan penugasan OMP, profesionalismenya di bidang kemiliteran tidak diragukan lagi karena kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan adalah berlatih dan berlatih melaksanakan latihan pertempuran, serta sewaktu-waktu siap untuk digerakkan ke medan perang menghadapi kekuatan militer negara lain. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1) yang dikatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk menjaga kemampuan dan kesiapan prajurit tersebut, dilaksanakan kegiatan pembinaan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan petunjuk pembinaan dan latihan serta petunjuk materi latihan korps marinir yang didukung peralatan tempur modern dan lengkap, sehingga mampu menghadapi perkembangan dan dinamika strategis yang mengancam kedaulatan negara republik indonesia. Akibat dari seringnya melaksanakan latihan yang berorientasi latihan penugasan OMP menjadikan prajurit Yonif 4 Marinir siap tempur penuh (ST-1) yaitu suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan tugas sesuai fungsi utamanya atau tugas pokok yang diembannya, karena 3 (tiga) unsur kesiapan tempur yang meliputi personil, material dan latihan dipenuhi masing-masing lebih besar atau sama dengan 95%.

Saran Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada Stakeholder. yaitu

1. Pelaksanaan kegiatan OMSP bagi prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir, merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara melalui implementasi pelaksanaan perintah pimpinan TNI, dasarnya adalah MoU yang telah dibuat oleh Panglima TNI dengan pimpinan Kementerian/Lembaga selain Kementerian Pertahanan. Sementara untuk menghindari dampak negatif apabila ada permintaan yang terkait tugas perbantuan, maka prajurit yang melaksanakan penugasan OMSP, kedepannya diharapkan melaksanakan pergantian atau rotasi penugasan secara tetap yaitu tidak terlalu lama atau tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Masa damai bagi seorang prajurit merupakan masa persiapan untuk melaksanakan suatu

pertempuran atau melaksanakan tugas OMP, hal ini sesuai dengan tugas pokoknya selaku prajurit, seperti yang tercantum dalam UU NO 34/2004 tentang TNI. Satuan tempur BTP seperti prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir disiapkan secara khusus dan fokus melaksanakan kegiatan latihan yang menunjang tugas pokoknya dalam melaksanakan OMP melalui operasi amfibi, tuntutan profesionalisme di bidang pertahanan mutlak, karena sewaktu-waktu melaksanakan tugas OMP menghadapi agresi atau ancaman militer yang datang dari negara lain, kedepannya batalyon yang disiapkan untuk melaksanakan penugasan OMP, agar dibebaskan dari tugas apapun yang tidak ada kaitannya dengan kesiapan melaksanakan operasi tempur, termasuk penugasan OMSP

Daftar Pustaka
Creswel, W.Jhon, W. (2014), Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Pustaka Pelajar

- Fadila, Helmi, Avin. (1996), Disiplin Kerja, Buletin Psikologi Tahun IV No 2 Desember 1996 Edisi Khusus Ulang Tahun XXXII, hal 35
- Kemhan RI (2015) : Buku Putih Pertahanan Indonesia
- Moleong, J. Lexy. (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung
- Rusdi, M. Al Araf, Ghufon, M. junaidi. (2005) : Menuju TNI Profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI), Imparsial,
- Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil, LSPP
- Syaiful Anwar (2016) : Melindungi Negara, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Samuel, P. Huntington. (1957), The Soldier and The State “ The Theory and Politics of civil Military Relation” The Belknap Press of Harvard university press
- Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/264/IV/2013 tanggal 5 April 2013, tentang Doktrin Operasi Amfibi;